







	<b>PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA</b> Jl. Tjilik Riwut Km 5 Palangka Raya Website: <a href="http://www.ptun-palangkaraya.go.id">http://www.ptun-palangkaraya.go.id</a>   Email: <a href="mailto:palangkaraya@ptun.org">palangkaraya@ptun.org</a>	<b>No. Dokumen</b>	SOP/027/PRK/2018
		<b>Revisi Ke</b>	00
		<b>Tgl Berlaku</b>	02 Januari 2018
		<b>Halaman</b>	1/2
		<b>Disahkan Oleh</b>	Ketua PTUN P.Raya
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENERIMAAN PERMOHONAN EKSEKUSI</b>			

<b>TUJUAN :</b>  Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam Penerimaan Permohonan Eksekusi Putusan Perkara yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.	
<b>RUANG LINGKUP :</b>  Prosedur ini mencakup proses Penerimaan Permohonan Eksekusi Putusan Perkara yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, tindak lanjut terhadap Permohonan Eksekusi Putusan Perkara tersebut adalah Tersedianya kelengkapan biaya proses perkara dan perkara siap untuk didaftarkan.	
<b>DASAR HUKUM :</b>  1. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor:5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya 4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 185/Djmt.3/SE/2/2016 Tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>  1. SLTA 2. S1-Hukum
<b>KETERKAITAN :</b> 1. SOP Pendaftaran Eksekusi 2. SOP Penetapan Eksekusi	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b> 1. Surat permohonan eksekusi 2. ATK, komputer/laptop, printer 3. SKUM 4. Buku Jurnal Keuangan Perkara Pengawasan Eksekusi 5. Berkas perkara 6. Buku register perkara pengawasan eksekusi
<b>PERINGATAN :</b>  Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>  Berkas Perkara
<b>DEFINISI :</b>  1. eksekusi : pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.	

	<b>PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA</b> Jl. Tjilik Riwut Km 5 Palangka Raya Website: <a href="http://www.ptun-palangkaraya.go.id">http://www.ptun-palangkaraya.go.id</a>   Email: palangkaraya@ptun.org	<b>No. Dokumen</b>	SOP/027/PRK/2018
		<b>Revisi Ke</b>	00
		<b>Tgl Berlaku</b>	02 Januari 2018
		<b>Halaman</b>	2/2
		<b>Disahkan Oleh</b>	Ketua PTUN P.Raya
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENERIMAAN PERMOHONAN EKSEKUSI</b>			

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Petugas Meja III	Panitera Muda Perkara	Kasir	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output
1	Menerima pengajuan permohonan eksekusi dari pihak/kuasa Pemohon eksekusi				- surat permohonan eksekusi	1 hari	Diterimanya permohonan eksekusi
2	Memeriksa persyaratan formil pengajuan permohonan eksekusi dari pihak Pemohon				- surat permohonan eksekusi		Terdatanya kelengkapan permohonan
3	Menghitung biaya panjar eksekusi yang selanjutnya dituangkan dalam SKUM				- SKUM		Terdatanya kelengkapan biaya proses permohonan eksekusi
4	Menerima bukti penyetoran panjar biaya permohonan eksekusi yang telah disetor ke Bank				- Slip penyetoran		Tersedianya kelengkapan biaya proses perkara
5	Mencatat transaksi keuangan kasasi dalam Buku Jurnal Keuangan perkara pengawasan Eksekusi				- Buku jurnal keuangan perkara pengawasan eksekusi		Tercatatnya transaksi keuangan dalam jurnal
6	Menyerahkan berkas perkara untuk didaftarkan dalam buku register perkara pengawasan eksekusi				- Berkas perkara - Buku register perkara pengawasan eksekusi		Perkara siap untuk didaftarkan